

**PERJANJIAN KERJASAMA USAHA DENGAN MITRA ESQUE INDONESIA  
SEBAGAI PERJANJIAN WARALABA DAN BENTUK PELINDUNGAN HUKUM  
SETELAH TERJADI *REBRANDING* BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 42 TAHUN 2007**

Muhammad Ilham Fikri,<sup>1</sup> Annisa Syaufika, S.H., M.H.<sup>2</sup>

**INTISARI**

Esque Indonesia adalah suatu usaha minuman di Yogyakarta yang membuka kemitraan dengan pola yang mirip dengan waralaba. Sebelumnya Esque melakukan *rebranding* karena nama usaha sebelumnya sudah didaftarkan pihak lain sebagai merek dagang. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian perjanjian kerjasama Esque Indonesia dengan ketentuan PP No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dan bagaimanakah perlindungan hukum bagi mitranya dalam hal terjadinya *rebranding*.

Penelitian ini bersifat yuridis empiris dimana penelitian ini berdasarkan penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Data primer diperoleh wawancara dengan responden, sedangkan data sekunder didapatkan dengan cara mencari, memahami, membaca, menganalisa, dan mengkaji dari bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan terseier. Kemudian data yang didapatkan dianalisis menggunakan metode kualitatif dan selanjutnya akan disajikan secara deskriptif sehingga diperoleh jawaban yang dapat menyelesaikan permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian, dua kesimpulan diperoleh: Pertama, Perjanjian kemitraan Esque Indonesia tidak dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian waralaba yang diatur PP Nomor 42 Tahun 2007, karena tidak memenuhi salah satu kriteria Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar. Kedua, Perlindungan Hukum terhadap mitra terkait dengan adanya *rebranding* Ngelak Indonesia ke Esque Indonesia dirasa masih kurang melindungi pihak mitra dikarenakan tidak ada perlindungan hukum internal dari Pihak Esque Indonesia terhadap mitra didalam perjanjiannya.

**Kata Kunci: Perjanjian, Waralaba, *Rebranding*.**

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Mahasiswa Konsentrasi Hukum Perdata pada Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

<sup>2</sup> Dosen Hukum Perdata pada Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

Perjanjian Kerja Sama Usaha Dengan Mitra Esque Indonesia Sebagai Perjanjian Waralaba Dan Bentuk  
Pelindungan Hukum Setelah Terjadi Rebranding Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007

MUHAMMAD ILHAM FIKRI, Annisa Syaufika, S.H., M.H.

Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

## **ESQUE INDONESIA PARTNERSHIP AGREEMENT AS A FRANCHISE AGREEMENT AND A LEGAL PROTECTION RELATED WITH REBRANDING BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 42 OF 2007**

**Muhammad Ilham Fikri<sup>3</sup>, Annisa Syaufika, S.H., M.H.<sup>4</sup>**

### **ABSTRACT**

*Esque Indonesia is a beverage business located in Yogyakarta which applies partnership mechanism similar with franchise. Previously Esque pulled off rebranding due to the previous brand used apparently had been registered as trademark by other person. This research aims to identify and analyse the compliance of Esque Indonesia partnership with Government Regulation No. 42 of 2007 on Franchise and the legal protection towards partner related with rebranding.*

*This research is juridical empirical where this research is based on field research and literature study. Primary data were obtained from respondents, while secondary data is obtained by searching, understanding, reading, analyzing, and reviewing library materials consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Then the data that has been obtained is analyzed using qualitative methods and will then be presented descriptively so that answers are obtained that can solve the problem.*

*Based on the results of the study, it can be concluded that: First, the Esque Partnership Agreement cannot be categorized as a franchise agreement based on Government Regulation No. 42 of 2007 because it does not fulfill the requirement of registering Intellectual Property Rights. It does not meet the provisions in Government Regulation No. 42 of 2007. Second, the legal protection towards partner is insufficient due to the absence of internal legal protection in the agreement made by partners.*

**Keywords: Agreement, Franchise, Rebranding.**

---

<sup>3</sup> The Author is a Civil Law Concentration Student at the Civil Law Department, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

<sup>4</sup> Lecturer of Civil Law at the Department of Civil Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.